

Penyuluhan Menghadapi Tahun Politik dengan Membangun Generasi Anti Hoaks

Dwi Ardiyanti

Universitas Potensi Utama
Jl. KL. Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3-A, Tanjung Medan.
e-mail: ardiyanti.1987@gmail.com

Abstrak

Iklim demokrasi di Indonesia menjadi semakin menarik untuk dibahas dan dikaji. Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, penulis ingin mengetahui bagaimana para siswa SMA menganalisa berita tentang pemilihan umum yang banyak beredar, serta bagaimana mereka melihat kebohongan dalam berita yang tersebar. Beberapa akibat dari adanya berita hoaks atau berita bohong adalah tingginya angka apatisisme dalam pemilihan umum, terutama pemilih muda tingkat SMA. Semakin banyak berita hoaks, disinyalir semakin enggan mereka kemudian mengikuti proses dalam politik sehingga angka apatisisme terhadap partisipasi politik tinggi di Kota Medan. Berita hoaks tentang politik yang beredar di masyarakat kebanyakan berupa gambar yang diedit kemudian ditambahi beberapa kalimat tanpa sumber yang pasti. Oleh karena itu penulis dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini kemudian melakukan studi lapangan tentang bahaya berita hoaks yang beredar di kalangan siswa SMA.

Kata kunci: hoaks, pemilihan umum, siswa, apatisisme, politik, dan demokrasi

1. Pendahuluan

Penelitian ini berlatar belakang dari ketertarikan penulis dengan semakin maraknya angka apatisisme di Kota Medan. Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi yaitu pemilihan umum di tahun 2019. Indonesia akan memilih pemimpinnya untuk lima tahun kedepan. Dalam momentum ini, kampanye akan dilakukan demi mendapatkan suara rakyat. Kemajemukan partai telah mewakili banyaknya kepentingan rakyat Indonesia yang dikenal terdiri dari banyak suku, agama, dan ras. Sehingga, kepentingan rakyat di sini adalah hal utama untuk diperhatikan dalam pemilu 2019.

Permasalahan yang biasa muncul ketika ada momentum kampanye adalah banyaknya beredar isu hoaks (palsu) yang digunakan untuk memanipulasi berita demi kampanye 2019. Pemutarbalikan isu ini sangat berbahaya terutama bagi siswa SMA yang masih awam terhadap pengetahuan politik.

Hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang harus tercerai berai karena adanya isu hoaks yang beredar di masyarakat. Di dunia nyata, agama dan politik semakin banyak digunakan untuk media penyebaran isu hoaks. Sedangkan di dunia maya, hal ini lebih berat lagi untuk diatasi karena semakin canggihnya teknologi, terutama edit

gambar yang mudah di *like* dan *share*. Oleh karena itu, kesadaran politik sedari dini sangat penting.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul “**Penyuluhan Menghadapi Tahun Politik dengan Membangun Generasi Anti Hoaks**” diharapkan akan berkontribusi untuk membuka pengetahuan politik sejak dini di kalangan siswa SMA.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah penulis jabarkan, maka penulis mengidentifikasi adanya hal-hal yang menjadi masalah penelitian, yaitu:

- Adanya permasalahan di lapangan, yaitu sulitnya mengakomodir akun media sosial untuk mencegah hoaks
- Kurangnya pengetahuan siswa tentang politik sedari dini dan kampanye di tahun 2019
- Kurangnya kesadaran siswa untuk ikut terlibat dalam pencegahan hoaks di keseharian

Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

- Menumbuh kembangkan kesadaran politik siswa SMA
- Mengedukasi para siswa tentang pentingnya partisipasi politik di tahun 2019
- Mengedukasi para siswa tentang pengetahuan dasar ilmu politik

Manfaat dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- Membekali siswa SMA Negeri 1 Labuhan Deli dengan pengetahuan dasar tentang politik dan pemilu
- Mendorong masyarakat tidak terjebak dengan isu Hoaks selama kampanye di tahun 2019
- Meningkatkan kesadaran pentingnya partisipasi mereka dalam mensukseskan pemilu 2019

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsif analitik. Penyusunan laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan menganalisa dan mengolah data lapangan secara kualitatif kemudian menyajikannya secara deskriptif analitik. Analisa yang dilakukan berdasarkan tinjauan pustaka yang dipakai sebagai kerangka teori.

Politik identitas seperti kesukuan yang ditampilkan oleh bakal calon terpilih dalam Pilkada dengan latar belakang

Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2019

SINDIMAS 2019

STMIK Pontianak, 29 Juli 2019

kesukumannya, merupakan salah satu pertimbangan penting dalam perilaku politik. Indra Kesuma Nasution (2014) menegaskan bahwa di Medan, Sumatera Utara, identitas kesukuan berpengaruh terhadap partisipasi politik, terutama perilaku politik dalam Pilkada langsung 2010. Terkait pengaruh faktor kesukuan dalam Pilkada, Edward Aspinall (2011) menjelaskan bahwa identitas kesukuan dalam pertarungan politik Pilkada digunakan dalam tiga hal, yaitu dalam memobilisasi simbol kesukuan, menjadi pertimbangan pemilih, dan seleksi dan strategi kandidat pemimpin.

Manuel Castells (2010), membedakan identitas individu dalam tiga kategori, yaitu *legitimiteidentity*, *resistance identity* dan *projectidentity*. Pertama, Identitas Legitimasi (*legitimiteidentity*). Identitas jenis ini merupakan proses mengenalkan institusi dominan dari sebuah masyarakat untuk memperluas dan merasionalisasi dominasi mereka terhadap pelaku sosial. Dalam kasus minimnya angka partisipasi politik masyarakat kota Medan, *legitimate identity* merupakan salah satu faktor calon dengan marga tertentu menegaskan dominasinya untuk mendapat *legitimate identity* di masyarakat luas dan mendulang suara untuk pemilihan. Kedua, Identitas Perlawanan (*resistanceidentity*). Identitas ini merupakan sebuah identitas yang dipertahankan dengan melakukan perlawanan untuk mempertahankan identitas tersebut melalui stigma dari pihak yang mendominasi. Ketiga, Identitas Proyek (*project identity*) yaitu para pelaku sosial membangun sebuah identitas baru yang bertujuan mendefinisikan kembali posisi mereka dalam masyarakat dengan berusaha bertransformasi dari struktur sosial secara menyeluruh.

2. Metode Pelaksanaan

Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penyuluhan. Lokasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berada di SMA Negeri 1 Labuhan Deli, Medan, sasarannya adalah siswa. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan kurang lebih 40 siswa.

3. Hasil Pelaksanaan

Hasil dari Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah semakin banyak siswa SMA yang sadar bahaya laten dan berita hoaks. Salah satu contohnya adalah menjadi pihak yang apatis dalam partisipasi politik. Jika sudah menjadi apatis, maka dikhawatirkan semakin banyak pilkada korup yang menjerat Medan. Siswa juga sadar dan mengetahui pentingnya suara dalam partisipasi politik, sehingga mereka tidak ingin menjadi apatis. Berita hoaks yang beredar di masyarakat sesungguhnya bisa dicegah dengan adanya pendidikan tentang politik atau sadar politik sejak dini dengan cara yang benar. Kemudian, penggunaan media sosial oleh siswa SMA dapat dikontrol oleh orang tua. Dalam hal ini KEMINFO juga memiliki peran besar untuk mencegah semakin maraknya peredaran berita hoaks yang meresahkan masyarakat, terutama di masa Pemilihan umum maupun Pilkada.

Dalam data yang dirilis oleh beberapa lembaga survei tercatat angka partisipasi pemilih pada Pilkada serentak di 8 provinsi, 222 kabupaten, dan 34 kota. Dari data sementara, rata-rata partisipasi pemilih berkisar 50-65%. Dari 1,9 juta pemilih, sekitar 1,4 juta tidak memberikan hak suaranya.

Menurut CEO Polmark Indonesia, Eep Saefullah Fatah, bahwa ada variabel dalam pelaksanaan Pilkada yang perlu dievaluasi seperti UU Nomor 8/2015 tentang Pilkada dan turunannya, yakni Peraturan KPU (PKPU) tentang Pilkada. Di sisi lain, ada faktor kejenuhan masyarakat di balik rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak. Rendahnya partisipasi politik di daerah pada Pilkada serentak 2015, menimbulkan pandangan yang berbeda, ada yang menyalahkan penerapan sistem baru dalam proses demokrasi tersebut dan tidak sedikit pula yang menyalahkan kualitas sosok figur calon pemimpin di daerah.

Dengan semakin banyaknya keterlibatan para pemimpin di Sumatera Utara dan kota Medan dalam beberapa kasus korupsi, menimbulkan reaksi berupa apatisisme masyarakat Medan terhadap politik. Sikap tersebut menjadi jawaban bahwa masyarakat khususnya di kota Medan, seakan telah jenuh dengan sosok dan figur pemimpin yang terus menggunakan pencitraan, tanpa diikuti dengan perilaku baik serta merealisasikan janji-janji dalam segala bentuk kerja yang nyata. Dengan partisipasi pemilih hanya berkisar pada angka 26%, menjadi catatan buruk dalam perjalanan politik di kota Medan. Hal ini tentunya membawa imbas akan kurangnya kepercayaan penuh terhadap pemimpin terpilih. Medan sebagai salah satu kota Metropolitan di Indonesia mengalami masalah yang pelik dalam bidang politik dan sosial. Di tengah kemajemukan masyarakat yang berasal dari berbagai suku maupun agama ditemukan angka yang cukup besar dalam hal apatisisme terhadap partisipasi politik dari masyarakat umum. Hal ini menarik untuk dikaji, selain karena tipe masyarakat majemuk yang hampir sama dengan kota Jakarta, namun Medan menduduki angka paling tinggi di Indonesia dalam hal apatisisme terhadap kegiatan politik. Jakarta yang merupakan ibukota Indonesia, memiliki peran yang signifikan untuk dalam bidang penyiaran media maupun pencitraan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini didukung dengan ketertarikan masyarakat Jakarta untuk mengikuti Pilkada di Jakarta. Sehingga, dalam Pilkada masih dimungkinkan menjalani dua putaran seperti pemilihan Gubernur Jakarta 2017. Namun, berbeda halnya dengan kota Medan yang tidak mungkin melakukan hal yang sama. Selain karena dana untuk Pilkada, apatisisme masyarakat kota Medan terhadap partisipasi politik dipandang tidak akan membawa perubahan apapun untuk Pilkada.

Di sisi lain, sikap apatisisme masyarakat terhadap partisipasi politik ini juga berdampak pada penurunan efektifitas kebijakan publik. Mengingat bahwa keputusan untuk wilayah kota Medan dibuat oleh para pemenang

Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2019

SINDIMAS 2019

STMIK Pontianak, 29 Juli 2019

Pilkada tanpa keikutsertaan sebagian besar masyarakat Medan.

Alternatif pemecahan masalah dilakukan dengan mengadakan penyuluhan tentang bahaya apatisisme terhadap partisipasi politik, terutama di tingkat SMA/SMK dalam lingkup pemilihan OSIS. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan salah satu bentuk pencegahan apatisisme yang lebih tinggi lagi, mengingat Medan adalah kota Metropolitan dengan tingkat Apatisisme tinggi di Indonesia.

Generasi anti hoaks sangat penting dibentuk. Generasi inilah nantinya yang akan meneruskan pemerintahan di Indonesia. Budaya politik bersih harus dibiasakan sejak dini, yaitu sejak mereka menjadi pemilih, usia 17 tahun. Budaya demokrasi di Indonesia yang mengedepankan kesamarataan hak dalam politik, cenderung banyak menuai kontroversi yaitu dengan adanya penggunaan *black campaign* dalam pilkada. Penyebaran berita hoaks adalah salah satu cara *black campaign* yang harus dihindari. Oleh karena itu penyuluhan tentang bahaya berita hoaks serta bagaimana penanganan dan pencegahan menyebarnya berita hoaks sangat penting dilakukan, terlebih di masa pemilihan baik pemilu maupun pilkada.

Nantinya, berita hoaks tidak akan lagi dapat ditampilkan dengan bebas. Dengan adanya kerjasama baik dari pemerintah, media, maupun masyarakat, maka berita hoaks tidak akan dapat beredar, sehingga isu perpecahan yang menggunakan politik identitas tidak akan ada lagi. Hal ini penting dilakukan mengingat kultur suku dan keragaman budaya maupun agama dan etnis di Indonesia berpotensi besar untuk dirusak dengan menggunakan isu politik identitas.

Ke depan, isu politik dengan menggunakan identitas apapun tidak akan dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Siswa SMA adalah bibit penting, terutama di Medan, yang menduduki angka apatisisme tertinggi seIndonesia. Di Medan dengan kultur beragam, dan perilaku etnis yang dominan akan dapat terpecah belah jika tidak mendapat penyuluhan sejak dini. Sosialisasi partai maupun Pilkada merupakan hal yang penting agar dapat mencapai tujuan, yaitu menyelenggarakan Pilkada yang aman, tertib, dan diikuti oleh seluruh masyarakat. Namun, 21 kecamatan dan 151 kelurahan yang ada di kota Medan, penyebaran informasi tentang Pilkada belum merata. Hal ini dikarenakan kesibukan masyarakat di ibukota Provinsi Sumut ini berbeda-beda. Tidak semuanya masyarakat kota Medan punya waktu membaca koran, mendengar radio atau mencari informasi soal Pilkada melalui gadget (alat elektronik). Dengan kata lain, KPU khususnya Kota Medan hanya berkutat pada tahapan Pilkada saja, yang seharusnya sosialisasi sebelum diselenggarakan Pilkada adalah hal yang penting untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat ketika Pilkada berlangsung. Begitu juga dengan Pamwaslu Kota Medan. Lembaga ini hanya berfokus pada pengawasan kinerja dari KPU, yang seharusnya sebagai badan untuk ikut membantu mensukseskan Pilkada dengan mengajak masyarakat untuk datang ke TPS.

Komisioner KPU kota Medan, Pandapotan Tamba, menampik penilaian bahwa tingginya tingkat golput pada Pilkada Medan karena kesalahan pihaknya. Tidak terima dengan penilaian yang mengatakan bahwa pihaknya kurang melakukan sosialisasi ke masyarakat. Meski demikian, Tamba tidak menampik bahwa golput memang tinggi. Menurutnya, masyarakat menjadi apatis karena bayang-bayang pejabat yang selalu berbuat korup sejak dilantik. Meski tingkat golput begitu tinggi, lanjut Tamba, hasil Pilkada ini tetap akan sah dan tidak akan ada pemilihan ulang.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa terdapat indikasi bahwa peningkatan apatisisme masyarakat Medan dalam partisipasi politik Pilkada berhubungan dengan penurunan efisiensi kebijakan publik yang diambil di tingkat daerah dan tidak mendapat perhatian serius dari masyarakat kota Medan sendiri. Kebijakan publik merupakan salah satu implementasi dari hasil pemilihan kepala umum, terutama pemilihan kepala daerah. Kebijakan publik adalah unsur penting dalam pembuatan segala keputusan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, hingga olahraga.

Kebijakan publik dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* (dari atas ke bawah) dan *bottom up* (dari bawah ke atas). Setiap pengambilan keputusan dalam kebijakan publik seharusnya melibatkan unsur masyarakat. Oleh karena itu, peran masyarakat sangat penting, baik sebelum pembuatan kebijakan dilakukan maupun setelah proses pengambilan keputusan.

Kebijakan publik yang dibuat oleh calon yang terpilih menentukan nasib daerah dalam waktu lima tahun, berhubungan dengan efisiensi pemakaian anggaran dan implementasi kebijakan pusat ke daerah.

Kebijakan publik dan pelayanan publik merupakan dua variabel penting dalam administrasi publik kontemporer yang memiliki hubungan kausalitas yang tinggi, tidak dapat dipisahkan walaupun bisa dibedakan fungsinya. Pelayanan yang baik harus bertitik tolak dari kebijakan publik sehingga memiliki dasar hukum yang jelas untuk mencegah terjadinya penyimpangan, agar tidak hanya sekedar ketentuan formal di atas kertas tanpa memberi makna terhadap kehidupan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini perlu diberi sosialisasi tentang pentingnya suara mereka dalam Pilkada yang nantinya menentukan proses perumusan kebijakan publik. Sehingga, pelayanan publik juga dapat dioptimalkan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2019

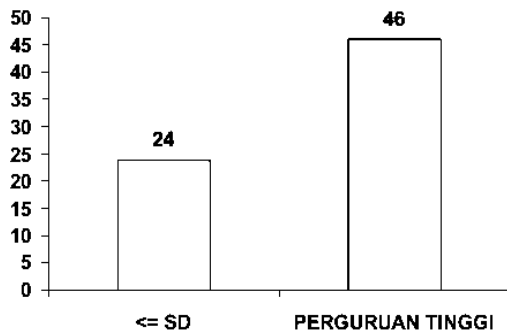
SINDIMAS 2019

STMIK Pontianak, 29 Juli 2019

Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan publik hingga implementasinya. Jika apatisme masyarakat di Kota Medan sudah tinggi terhadap segala kegiatan atau partisipasi politik, maka kemungkinan besar kebijakan publik yang nantinya diutamakan untuk kepentingan masyarakat juga akan beralih fungsi menjadi kepentingan golongan tertentu yang akan menurunkan efektivitas pembuatan kebijakan publik bagi pelayanan publik, terutama tingkat daerah.

Tertarik politik menurut pendidikan (%)

Sumber: Survei Nasional SMRC Februari 2012



Yang kurang terpelajar lebih apatis.

indikator
Politik Indonesia

Gambar 1. Ketertarikan Siswa terhadap Politik



Gambar 2. Foto Kegiatan



Gambar 3. Foto Kegiatan

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah:

- Berita hoaks tentang politik mempengaruhi angka apatisme di Medan yang menyebabkan semakin tinggi angka apatisme
- Berita hoaks di kalangan siswa SMA dapat dicegah dengan kerjasama antara orang tua, KEMINFO, maupun siswa itu sendiri yang teliti dalam menggunakan media sosial
- Semakin banyak propaganda yang disebarkan melalui media sosial sehingga perlu penanganan yang baik dari pemerintah maupun dari masyarakat
- Masyarakat perlu diberikan penyuluhan tentang bahaya apatisme terhadap partisipasi politik.
- Semakin banyak masyarakat yang enggan berpartisipasi dalam bidang politik, maka akan semakin menurun efektifitas kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah terpilih
- Bagi masyarakat yang menjadiorang tua siswa, akan lebih baik jika mendampingi para siswa dalam melihat berita politik, sehingga informasi yang diberikan dapat dicerna dengan baik oleh anak usia siswa SMA

Daftar Pustaka

- R. Ibrahim, "Ancaman Hoax Jelang Pemilu 2019," Presidium Mafindo, The Indonesian Institute, 19 Maret 2019.
- I. A. Fauzi, dkk, "Buku Panduan Melawan Hasutan dan Kebencian," Pusat Studi Agama dan Demokrasi, Yayasan Paramadina Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Bandung, 2019.
- D. Hutabarat, "Mengantisipasi Penyebaran Hoaks yang Kian Masif Jelang Pilpres 2019," KEMINFO, Januari 2019
- R. Ramadhan, "Modus Hoaks di Pemilu 2019 dan Upaya-Upaya Mengatasinya," Tirto.id. Oktober 2018.
- I. Hemay, A. Munandar, "Politik Identitas dan Pencitraan Kandidat Gubernur terhadap Perilaku Pemilih," Jurnal Kajian Politik dan

Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2019

SINDIMAS 2019

STMIK Pontianak, 29 Juli 2019

- Masalah Pembangunan, Jurnal Politik, Vol. 12, No. 01, Universitas Nasional Bengkulu, 2016.
- [6]. N. A. Malau, "Perilaku Etnis Batak Toba dalam Pilkada Kota Medan," Jurnal Dinamika Politik, Vol. 1 No. 2, Oktober 2012.
- [7]. M. García, "Political Violence and Electoral Democracy in Colombia Participation and Voting Behavior in Violent Contexts," University of Pittsburgh, 2009.
- [8]. H. Arendt, "Eichmannin Jerusalem," Macmillan Company, New York, 1963.
- [9]. D. J. Christie, R. V. Wagner, D. A. Winter, 2001, "Peace, Conflict and Violence: Peace Psychology for the 21st Century Englewood Cliffs," Prentice-Hall, New Jersey, 2007
- [10]. R. Budiman, "Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif," Hakim Publishing, Bandung, 2013.